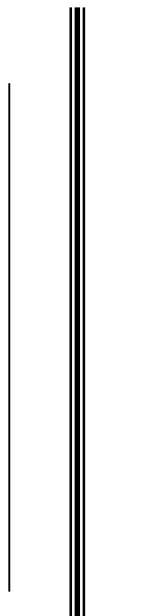


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA



RENCANA KERJA

DITPOLAIRUD POLDA KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025



KEPUTUSAN DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALIMANTAN BARAT
NOMOR:KEP/ 06 /IX/2023, TANGGAL 26 SEPTEMBER 2024

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA



KEPUTUSAN DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALIMANTAN BARAT
Nomor : Kep/ 06 /IX/2024

Tentang

RENCANA KERJA
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA
POLDA KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025

DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan perencanaan jangka menengah Ditpolairud Polda Kalbar, maka sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Polri, dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2015-2025;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
9. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/1/I/2024 tentang Pedoman Perencanaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2025;
10. Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Tahun 2020-2024

Memperhatikan

- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1132/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
2. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1910/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Indeks Kemanan dan Ketertiban Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
3. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/ /VII/2024 tanggal Juli 2024 tentang Rencana Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025;
4. Naskah Grand Strategy Kepolisian Negara Republik Indonesia 2025-2045, tanggal November 2023;
5. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Kep/228/IV/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Revisi Rencana Strategis Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Tahun 2020-2024;
6. Rancangan Renstra Teknokratik Polda Kalbar Tahun 2025-2029.
7. Keputusan Direktur Polairud Polda Kalimantan Barat Nomor : Kep/02/IV/2021 tanggal 27 April 2021 tentang Rencana Strategis Ditpolairud Polda Kalimantan Barat Tahun 2020-2024(Revisi);
8. Rancangan Renstra Teknokratik Ditpolairud Polda Kalbar Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA KALIMANTAN BARAT TENTANG RENCANA KERJA TAHUN 2024
1. Rencana Kerja Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalimantan Barat TA. 2025 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing bagian dan Subdit di lingkungan Ditpolairud Polda Kalbar;

3 KEPUTUSAN DIRPOLAIRUD POLDA KALBAR
NOMOR : KEP / 06 / IX / 2024
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2024

2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 26 September 2024
DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALIMANTAN BARAT



Tembusan :

1. Kapolda Kalbar.
2. Irwasda Polda Kalbar.
3. Karorena Polda Kalbar.

RASPANI, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74030643

DAFTAR ISI

	Halaman
I. Latar Belakang	1
1. Kondisi Umum	1
a. Perkembangan Lingkungan Strategi	5
b. Analisa	16
2. Identifikasi Masalah	22
II. Tujuan dan Sasaran	23
1. Visi dan Misi Polda Kalbar	23
c. visi Polda Kalbar	23
d. misi Polda Kalbar	24
2. Visi dan Misi Ditpolairud Polda Kalbar	24
a. visi Ditpolairud Polda Kalbar	24
b. misi Ditpolairud Polda Kalbar	24
3. Tujuan Jangka Menengah	25
a. Tujuan Jangka Menengah Polda Kalbar	25
b. Tujuan Jangka Menengah Ditpolairud Polda Kalbar	25
4. Sasaran Prioritas	26
a. Sasaran Prioritas Polda Kalbar	26
b. Sasaran Prioritas Ditpolairud Polda Kalbar	26
III. Program Perioritas Nasional dan Arah Bijak Polri Tahun 2025	27
1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Kalbar T.A. 2025	27
2. Arah Kebijakan dan Strategi Ditpolairud Polda Kalbar T.A. 2025	38
IV. Program, Kegiatan dan Usulan Pagu Ideal Ditpolairud Polda Kalbar T.A. 2025	41
1. Program dan Kegiatan	41
2. Pagu Indikatif Ditpolairud Polda Kalbar T.A. 2025	42
V. Penutup	44

LAMPIRAN

1. RENCANA KERJA TAHUNAN DITPOLAIRUD POLDA KALBAR T.A. 2025
2. REKAP RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA T.A. 2025
3. SPRIN POKJA SUN RENJA T.A. 2025

RENCANA KERJA
DITPOLAIRUD POLDA KALBAR T.A. 2025

I. Latar Belakang

1. Kondisi Umum

Ditpolairud Polda Kalbar adalah unsur pelaksana dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda, bertugas memelihara keamanan ketertiban masyarakat di wilayah perairan Kalimantan Barat yang meliputi kegiatan penindakan hukum di wilayah perairan, patroli pengamanan wilayah perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia, patroli pengamanan alur pelayaran masyarakat Kalimantan Barat.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang semakin pesat, demikian juga dinamika tantangan yang dihadapi Polri. Saat ini kita memasuki era Society 5.0 yang juga dikenal dengan 'super-smart society' dimana kehidupan manusia dipermudah dengan adanya teknologi dan teknologi merupakan bagian dari manusia itu sendiri. Muncul banyak jenis kejahatan baru yang dahulu tidak dikenal, dan ini menuntut Polri untuk berinovasi dan siap menangani kejahatan tersebut.

Dinamika tantangan ini tidak terlepas dari pengaruh global, terutama dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyebaran informasi yang sudah tidak mengenal batas negara, kemajuan sarana transportasi, persaingan bebas di sektor ekonomi, serta pergeseran tata nilai sosial budaya dan/atau pola komunikasi masyarakat. Adanya tuntutan dari masyarakat tentang hak demokrasi, perlindungan atas hak asasi manusia, terwujudnya rasa keadilan, serta kecepatan kehadiran Negara dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, maupun penegakan hukum yang berkeadilan, terus disuarakan dari waktu ke waktu. Di samping itu, pasca pandemi Covid-19 yang masih memerlukan penanganan serius, pemerintah perlu terus

waspada

waspada terhadap situasi ketidakpastian global mulai dari krisis energi hingga keuangan, serta ancaman kejahatan berbasis teknologi baru.

Salah satu dampak dari dinamika tantangan yang terkait dengan tugas pokok Polri adalah perkembangan modus operandi dari setiap bentuk gangguan kamtibmas, baik yang bersifat konvensional (penganiayaan, pembunuhan, pencurian, penipuan, penggelapan, dan sebagainya), transnasional (terorisme, narkoba, kejahatan dunia maya, penambangan/penebangan/penangkapan ikan ilegal, perdagangan manusia), kejahatan yang merugikan kekayaan negara (korupsi, pencucian uang, gratifikasi, dan sebagainya), maupun kejahatan yang berpotensi memunculkan kontinjensi sosial (kekerasan sosial berlatar belakang SARA, tindakan sewenang-wenang terhadap kelompok marginal, keributan antar kelompok masa, dan sebagainya). Kemajuan teknologi dan informasi juga memunculkan bentuk kejahatan baru dengan modus yang lebih canggih, seperti kejahatan siber, transaksi keuangan ilegal, penipuan, pencurian data pribadi dan penyebaran berita bohong atau hoaks. Bahkan para teroris dan kelompok ekstrim telah memanfaatkan teknologi digital dalam melakukan rekrutmen, pelatihan dan operasi kejahatannya.

Guna menghadapi tantangan dan perkembangan era digital yang semakin kompleks, perlu smart policing yang dimaknai sebagai pelaksanaan tugas-tugas kepolisian secara lebih inovatif, menerapkan sains dan teknologi serta evidence-based (berbasis bukti), dan menggunakan pendekatan antar disiplin. Polri harus lebih maju dibandingkan pelaku kejahatan dengan terus berinovasi dan meningkatkan penguasaan teknologi. Sebagai aparat yang berkewajiban melindungi, melayani dan menegakkan hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, Polri perlu terus memiliki kemampuan yang mumpuni, baik secara organisasi, SDM, standar operasi maupun dukungan sarana prasarana.

Pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 pemerintah mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Dikarenakan tahun 2025 sebagai awal dari Rencana Pembangunan

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 sangat strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Sedangkan kebijakan prioritas nasional pemerintah tahun 2025 di bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) khususnya pada pembangunan stabilitas keamanan dan ketertiban pada bidang Polri.

Ditpolairud Polda Kalbar sebagai bagian dari fungsi pemerintahan yang bertanggung jawab dalam mewujudkan Keamanan Dalam Negeri dengan menjaga dan memelihara Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) khususnya di wilayah perairan Provinsi Kalbar harus mampu bersikap responsif terhadap berbagai perubahan yang terjadi melalui berbagai strategi dan program pemolisian untuk mewujudkan keamanan di wilayah perairan Provinsi Kalbar demi terselenggaranya Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan tugas Polri telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup signifikan dengan ditandai banyaknya pengungkapan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatnya pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Keberhasilan yang dicapai oleh Polda Kalbar tersebut merupakan kerja keras yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polda Kalbar dengan didukung oleh eksekutif, legislatif, yudikatif dan partisipasi masyarakat serta berbagai stakeholders yang terkait dengan tugas kepolisian. Sejauh ini apresiasi yang positif atau kritik yang membangun terhadap kinerja Polda Kalbar dari pemerintah/swasta/ masyarakat akan dijadikan tantangan bagi Polda Kalbar dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya guna mencapai keberhasilan yang lebih baik pada masa mendatang.

Keberhasilan yang diraih Polda Kalbar diharapkan dapat membuat Polda Kalbar semakin waspada dan meningkatkan antisipasi terhadap berbagai tantangan di masa mendatang. Tantangan tersebut berupa adanya harapan dan tuntutan dari masyarakat maupun pemerintah kepada Polda Kalbar untuk senantiasa terus-menerus secara berkelanjutan meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat di bidang

Kepolisian. Tantangan dan harapan masyarakat serta pemerintah kepada Polri adalah:

- a. Polri yang profesional, mandiri, transparan, adil, humanis namun tegas, bermoral, modern dan bebas dari KKN dalam memberikan pelayanan kepolisian;
 - b. menggelar kekuatan Polri hingga ke perbatasan dalam rangka mengantisipasi ambang gangguan di tengah-tengah masyarakat sehingga keberadaannya dapat memberikan rasa aman, tenteram dan nyaman;
 - c. menegakkan hukum secara profesional, proporsional, tegas, jujur, adil dan tuntas, terhadap gangguan nyata serta mewujudkan transparansi dalam proses penyidikan tindak pidana;
 - d. meningkatnya fungsi intelijen yang mampu mendeteksi, mengantisipasi dan mencegah setiap potensi gangguan Kamtibmas.
- Mengacu pada Rencana Kerja Polda Kalbar T.A. 2024;

Ditpolairud Polda Kalbar telah menyusun Rancangan Rencana Kerja (Rarenja) Ditpolairud Polda Kalbar T.A 2025, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Polda Kalbar Tahun 2025-2029. Selain itu penyusunan Renja dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Rancangan Renja Ditpolairud Polda KalbarPolda Kalbar T.A. 2025 memuat arah kebijakan dan strategi demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana, sistematis dan tanggap akan perubahan. Dalam penyusunan Rancangan Renja Ditpolairud Polda Kalbar T.A 2025 sejalan dengan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/1/I/2024 tentang Pedoman Perencanaan Kapolri.

a. Perkembangan

a. Perkembangan Lingkungan Strategi

Ditpolairud Polda Kalbar dipimpin oleh Direktur Polairud Polda Kalbar yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda, Ditpolairud Polda Kalbar bertugas menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan yang mencakup patroli termasuk penanganan pertama terhadap tindak pidana dan pencarian serta penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan dan pembinaan masyarakat pantai / perairan serta pembinaan fungsi Kepolisian perairan dan udara dalam lingkungan Polda Kalbar. Pelaksanaan tugas Ditpolairud Polda Kalbar meliputi:

- 1) Patroli;
- 2) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara di perairan;
- 3) SAR di wilayah perairan dan;
- 4) Binmas pantai atau perairan serta pembinaan fungsi Kepolisian Perairan dalam lingkungan Polda.

Fungsi Ditpolairud Polda Kalbar dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Ditpolairud Polda Kalbar menyelenggarakan:

- 1) Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polda;
- 2) Pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan, dan Binmas pantai di daerah hukum Polda;
- 3) Pemberian bantuan SAR di laut/perairan;
- 4) Pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan;
- 5) Pelaksanaan telekomunikasi dan informatika di perairan; dan
- 6) Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpolairud.

Dalam pelaksanaan tugas Dirpolairud Polda Kalbar dibantu oleh antara lain:

a. Unsur Pimpinan:

1. Wakil Direktur Polairud Polda Kalbar (Wadir Polairud Polda Kalbar) adalah pembantu utama Direktur Polairud yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Polairud.

b. Unsur

b. Unsur Pembantu pimpinan dan pelaksana staf:

1. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin).

Melaksanakan penyusunan perencanaan organisasi, kesisteman, pelatihan peningkatan kemampuan, operasional dan latihan, manajemen sarana dan prasarana, administrasi personalia, kinerja, mengelola dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam, serta menyusun kebijakan dan rencana strategi dan pengembangan kekuatan fungsi serta jaringan dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a) menyusun dan menyiapkan rencana anggaran, rencana kerja, administrasi materiil dan logistik, pemeliharaan dan perawatan personel serta pembinaan fungsi kepolisian perairan;
- b) melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap jalannya program kerja dan anggaran Ditpolairud Polda Kalbar beserta jajarannya;
- c) menyelenggarakan fungsi pengawasan internal terhadap seluruh kegiatan Satker;
- d) menerbitkan semua surat perintah kegiatan penugasan personel kecuali surat perintah yang berhubungan dengan penugasan kapal, surat perintah yang berhubungan proses penyelidikan dan penyidikan dan surat perintah gerak kapal patroli serta surat perintah penjagaan;
- e) mengembangkan sistem dan metode dalam menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan fungsi Polairud;
- f) menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan sistim dan metode fungsi Polairud;
- g) menyiapkan administrasi pelaksanaan wanjak dalam rangka mutasi Perwira, Bintara dan PNS di lingkungan Ditpolairud Polda Kalbar;

h) menyelenggarakan

- h) menyelenggarakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin termasuk kesadaran hukum di lingkungan Ditpolairud Polda Kalbar;
- i) menyusun rencana, pelaksanaan, analisa dan evaluasi dan supervisi fungsi Polairud;
- j) menyusun kisi-kisi sebagai bahan supervisi dalam bidang perencanaan, anggaran, personel, sarpras dan sismet Polairud serta format laporan pelaksanaannya;
- k) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Dirpolairud Polda Kalbar;
- l) melaksanakan tugas lain sesuai perintah Dirpolairud Polda Kalbar.

Dalam pelaksanaan tugas Kasubbagrenmin di bantu oleh:

- a) Kepala Urusan Perencanaan (Kaurren);
- b) Kepala Urusan Administrasi (Kaurmintu);
- c) Kepala Urusan Keuangan (Kaurkeu).

2. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal).

Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan dan analisis data, program latkatpuan fungsi Polairud, kegiatan operasi rutin maupun terpusat dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a) menyusun dan mengajukan anggaran sesuai dengan bidang tugasnya;
- b) merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan program kegiatan latihan peningkatan kemampuan fungsi Polairud pada tahun anggaran berjalan sesuai Renja Satker yang menjadi tugas Subbagbinopsnal;
- c) merencanakan, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan Latpraops yang diprogramkan Biro Ops Polda Kalbar dalam rangka operasi Kepolisian;
- d) merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan latihan yang melibatkan fungsi Polairud dalam rangka mendukung operasi kepolisian yang diprogramkan institusi non Polri;

e) menyusun

- e) menyusun rancangan rencana latihan dan mengajukan anggaran pada tahun anggaran berjalan untuk kegiatan tahun anggaran berikutnya guna dimasukkan dalam rancangan Renja Satker;
- f) menyusun rencana kegiatan latihan yang menjadi beban tugasnya secara periodik (bulanan, triwulan, semester dan tahunan);
- g) menyusun laporan latihan yang menjadi beban tugasnya secara periodik (bulanan, triwulan, semester dan tahunan);
- h) mendata, mendokumentasikan kegiatan latihan dan menata kearsipan/administrasi pelatihan;
- i) pengawasan pelatihan (di luar program Subagopsnal) yang dilaksanakan Subsatker lainnya sebagai bahan laporan latihan Satker;
- j) menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan latihan dan kegiatan operasional Ditpolairud Polda Kalbar yang bersumber dari CIC;
- k) menerbitkan publikasi melalui buletin Ditpolairud Polda Kalbar atau media lainnya;
- l) menyelenggarakan pengumpulan laporan operasional dari subsatker yang terkait operasional pada tahun anggaran berjalan sesuai Renja Satker yang menjadi tugas Subbagopsnal;
- m) pengumpulan data hasil operasional subsatker terkait sebagai menyelenggarakan operasional untuk dilaporkan kepada Dirpolairud;
- n) menganalisa dan mengevaluasi hasil latihan yang diselenggarakan terbatas tugas dan tanggung jawab Subbagopsnal sesuai dengan renja Ditpolairud Polda Kalbar pada tahun anggaran berjalan;
- o) menghimpun dan mengkompulir hasil analisa dan evaluasi latihan yang diselenggarakan subsatker terkait dan operasional Ditpolairud Polda Kalbar dan Sat Polairud Polres untuk

untuk dijadikan laporan anev satuan pada tahun anggaran berjalan;

- p) menyusun kisi-kisi sebagai bahan supervisi dalam bidang pelatihan;
- q) melaksanakan administrasi latihan dan operasional serta menjaga tertib kearsipan dalam lingkup terbatas pada subbagopsnal;
- r) melaksanakan pembinaan personel dan perawatan sarana prasarana yang berada dalam lingkup terbatas pada Subbagbinopsnal;
- s) membuat laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan Ditpolairud Polda Kalbar.

Dalam pelaksanaan tugas Kabagbinopsnal di bantu oleh:

- a) Kepala Subbagian Administrasi Operasional (Kasubbagminopsnal);
- b) Kepala Subbagian Analisa dan Evaluasi (Kasubbaganev).

c. Unsur pelaksana tugas pokok

1. Sub Direktorat Penegakan Hukum (Subdit Gakkum) Ditpolairud Polda Kalbar.

Melaksanakan penyusunan rencana penyidikan, pembinaan taktis dan teknis penegakan hukum dalam lingkup Kepolisian Perairan serta antisipasi berbagai potensi gangguan keamanan diwilayah perairan Polda Kalbar dan melaksanakan tugas khusus lainnya sesuai perintah pimpinan dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a) mengajukan rencana kebutuhan dalam rangka penyelidikan penindakan, pemeliharaan, perawatan tahanan dan barang bukti;
- b) menyelenggarakan penyelidikan, penindakan tindak pidana di wilayah perairan Kalbar dan pemeliharaan, perawatan tahanan serta barang bukti;

c) menyelenggarakan

- c) menyelenggarakan pembinaan taktis dan teknis penegakan hukum dalam lingkup kepolisian perairan tingkat Polda maupun kewilayahan;
- d) menyelenggarakan registrasi dan identifikasi tindak pidana di perairan Polda Kalbar;
- e) merencanakan, merumuskan, dan mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan tugas penegakan hukum dalam rangka mendukung kegiatan kepolisian maupun operasi kepolisian di wilayah Perairan Polda Kalbar;
- f) mengumpulkan, menyiapkan, mendistribusikan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana di perairan;
- g) membuat pilun-pilun dalam rangka memberikan arahan dan petunjuk berkaitan dengan administrasi penyelidikan dan penyidikan di lingkup Subditgakkum, Kapal Polisi serta Polairud kewilayahan;
- h) menyelenggarakan pembentukan dan pembinaan jaringan guna mendapatkan informasi serta mengumpulkan data yang berkaitan dengan pelanggaran maupun tindak pidana di wilayah perairan Kalbar;
- i) menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penegakan hukum sebagai bahan masukan bagi perencanaan kegiatan operasional fungsi Polairud termasuk terhadap kasus-kasus tertentu yang menonjol serta memberikan rekomendasi penanganannya;
- j) memberikan bantuan teknis dan backup penyelidikan, pengamanan, penggalangan dalam rangka mengumpulkan informasi dan data guna antisipasi dampak penanganan perkara yang dilakukan oleh Ditpolairud Polda Kalbar maupun kesatuan kepolisian perairan kewilayahan;
- k) memberikan bantuan teknis dan back up penindakan dalam rangka pengungkapan dan penyelesaian perkara yang

dilakukan

dilakukan oleh Ditpolairud Polda Kalbar maupun kesatuan kepolisian perairan kewilayahan;

- l) menyelenggarakan gelar perkara;
- m) menyusun kisi-kisi sebagai bahan supervisi dalam bidang penegakan hukum;
- n) melaksanakan koordinasi dengan fungsi kepolisian lainnya dan badan/instansi/lembaga di luar Polri (PPNS) yang terkait dalam pelaksanaan tugas bidang penegakan hukum;
- o) membuat dan mengirimkan rangkaiat serta laporan bulanan dan tahunan kepada Dirpolairud tembusan Kabagbinopsnal;
- p) mengusulkan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas team was idik;
- q) melaksanakan tugas lain sesuai perintah Dirpolairud Polda Kalbar.

Dalam pelaksanaan tugas Kabagbinopsnal di bantu oleh:

- a) Kepala Seksi Intelair (Kasiintelair);
- b) Kepala Seksi Penyidikan (Kasisidik);
- c) Kepala Seksi Tahti (Kasitahti).

2. Sub Direktorat Patroli Air Dan Udara (Subditpatroliairud) Dit Polairud Polda Kalbar.

Melaksanakan penyusunan rencana Patroli, Polmas perairan kegiatan SAR di wilayah perairan Polda Kalbar serta melaksanakan tugas khusus lainnya sesuai perintah pimpinan dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a) menyelenggarakan dan memberikan petunjuk serta arahan mengenai pembinaan masyarakat perairan, patroli kawasan dan pengawalan yang dilakukan oleh kapal polisi dalam rangka memberikan perlindungan dan pelayanan guna terciptanya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum di wilayah perairan;
- b) menyelenggarakan pembinaan masyarakat perairan yang dilaksanakan kapal polisi;

c) menyelenggarakan

- c) menyelenggarakan patroli dan pengawalan perairan yang dilaksanakan kapal polisi;
- d) menyusun rencana kegiatan pembinaan masyarakat serta patroli dan pengawalan perairan oleh kapal polisi secara periodik (bulanan dan tahunan);
- e) setiap saat melaksanakan pengendalian kapal polisi dalam rangka pencapaian target dengan memberikan cara bertindak, petunjuk penanganan dan tindak lanjut pelanggaran/kejahatan yang ditemukan di laut;
- f) mengajukan saran mengenai sismet tentang pembinaan masyarakat serta patroli dan pengawalan;
- g) melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pembinaan masyarakat perairan, patroli dan pengawalan yang dilakukan oleh kapal polisi;
- h) menyusun arahan kepada pengemban fungsi teknik Polairud mengenai pembinaan masyarakat serta patroli dan pengawalan ;
- i) menyusun kisi-kisi sebagai bahan supervisi dalam bidang patroli, pengawalan dan binmas perairan;
- j) memelihara dan meningkatkan kemampuan/keterampilan staf Subditpatroliairud dan personel kapal melalui koordinasi pelatihan dengan Subsatker lainnya;
- k) mengarahkan kepada para Komandan kapal untuk kegiatan :
 - 1) pembinaan jasmani dan rohani personel kapal;
 - 2) pelaksanaan serta pertanggung jawaban keuangan;
 - 3) pemeliharaan kapal;
 - 4) administrasi kapal;
 - 5) petunjuk lapangan (sismet);
 - 6) komunikasi kapal;
 - 7) pengelolaan sumber daya kapal;
 - 8) binmas, patroli dan pengawalan;
 - 9) pelaporan;
 - 10) TPTKP.

l) merumuskan

- l) merumuskan dan menyiapkan kebijaksanaan Kapolda u.p. Dirpolairud Polda Kalbar di bidang patroli perairan;
- m) mengharmoniskan pelaksanaan patroli antara Ditpolairud Polda Kalbar dan Satpolairud Polres;
- n) menerbitkan surat perintah gerak kapal patroli polisi berdasarkan surat perintah berlayar yang dikeluarkan oleh Direktorat Polairud Polda Kalbar;
- o) mengajukan kebutuhan dan mendistribusikan uang saku, uang sandar, uang air tawar dan tunjangan lainnya berdasarkan penugasan kapal (SPB/TR);
- p) mengkompulir dan meneruskan laporan kerusakan serta rencana kebutuhan kapal;
- q) mengkoordinasikan dan mengawasi pemberangkatan maupun penerimaan kapal tiba di pangkalan serta membuat laporannya;
- r) menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembinaan masyarakat perairan serta patroli dan pengawalan yang dilakukan oleh kapal polisi;
- s) menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap personel dan kapal polisi baik yang sedang bertugas maupun yang berada di pangkalan;
- t) merencanakan, menyusun dan mengusulkan penempatan/ mutasi Komandan Kapal, KKM dan Perwira Kapal serta ABK;
- u) menyiapkan dan melaksanakan pemberian back up kepada satuan fungsi Polairud kewilayahan khususnya dukungan alat dalam kegiatan pencarian dan penyelamatan (SAR) bencana perairan;
- v) melaksanakan dukungan transportasi perairan dalam rangka tugas kepolisian ;
- w) pemberian acara pimpinan pasukan (APP) bagi ABK pada saat pemberangkatan maupun kembali dari tugas;

x) mengajukan

- x) mengajukan usulan pengembangan kemampuan bagi staf dan ABK;
- y) menyusun laporan kegiatan secara periodik (bulanan, triwulan, semester dan tahunan);
- z) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Dir Polairud Polda Kalbar;

Dalam pelaksanaan tugas Kabagbinopsnal di bantu oleh:

- a) Kepala Seksi Patroli dan Pengawalan Perairan dan udara (Kasi Patwalairud);
 - b) Kepala kasi Binmasair dan Potdirga (Kasibinmasair).
3. Sub Direktorat Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Subdit Fasharkan) Ditpolairud Polda Kalbar.

bidang sarana dan prasarana alat apung/ Kapal Pattroli maupun speed Patroli, alat-alat komunikasi di atas kapal/ speed, serta sebagai team pengecek kelaik lautan Kapal Patroli Polisi dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a) menyiapkan fasilitas dan jasa, pemeliharaan dan perbaikan materiil peralatan komunikasi, elektronika dan kapal;
- b) menyelenggarakan pengawasan, pemeliharaan dan perawatan permesinan, kelistrikan, docking dan bangunan kapal serta pengkajian teknologi perkapalan dalam rangka kelaiklautan dan keselamatan pelayaran;
- c) merumuskan, mengkoordinasikan dan menyiapkan kebijaksanaan Kapolda Kalbar u.p. Dirpolairud di bidang fasilitas pemeliharaan dan peralatan khusus Polairud;
- d) menyiapkan dan menyusun spesifikasi teknis dalam rangka pembaharuan dan penambahan peralatan pendukung alat utama Polairud serta kelistrikan kapal;
- e) menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan dalam rangka pembaharuan dan penambahan alat pendukung alat Polairud kepada Dirpolairud Polda Kalbar tembusan Kasubbagrenmin;

f) mengikuti

- f) mengikuti perkembangan teknologi dan pengkajian dalam rangka pra pengadaan peralatan utama beserta pendukung;
- g) menyelenggarakan pengumpulan data dari para komandan kapal dalam rangka pemeliharaan dan perawatan kapal polisi;
- h) membantu/memberi pertimbangan pengembangan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan alat Ditpolairud Polda Kalbar;
- i) mengkoordinasikan rencana pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas dengan badan/instansi didalam dan di luar Ditpolairud Polda Kalbar;
- j) memberikan rekomendasi berkaitan dengan kelaiklautan kapal Polisi beserta alat pendukungnya;
- k) mengusulkan pelaksanaan uji berlayar (sea trial) terhadap kapal yang selesai perbaikan, yang akan berangkat tugas dan yang kembali dari penugasan dengan dilampiri kerangka acuan uji berlayar sea trial dan membuat laporannya;
- l) menyusun kisi-kisi sebagai bahan supervisi dalam bidang fasharkan, kelaiklautan dan keselamatan;
- m) membuat dan mengirimkan rengiat bulanan dan tahunan;
- n) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Dirpolairud Polda Kalbar;
- o) melaksanakan tugas lain sesuai perintah Dirpolairud Polda Kalbar.
- p) didalam melaksanakan tugas Subditfasharkan menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan dan perbaikan di Dok serta bangunan kapal, perbaikan mesin serta instalasi listrik dan pengawasan kelaiklautan serta keselamatan kapal Polri.

Dalam pelaksanaan tugas Kabagbinopsnal di bantu oleh:

- a) Kepala Seksi Fasilitas (Kasifas);
- b) Kepala Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan (Kasiharkan);
- c) Kapal.

2. Analisa

b. Analisa

Pelaksanaan tugas Dipolairud Polda Kalbar dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari internal dan eksternal. Faktor internal merupakan aspek kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal merupakan aspek peluang dan tantangan. Aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan perlu untuk dilakukan identifikasi dan analisa agar dapat ditemukan formula yang tepat dalam menyusun kebijakan dan strategi pelaksanaan tugas Dipolairud Polda Kalbar.

1) Kekuatan (*Strenght*)

- a. Untuk mendukung pelaksanaan tugas di tahun 2025 Ditpolairud Polda Kalbar didukung dengan Piranti Lunak/dasar hukum berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kapolri sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS;
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
- 6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polisi Perairan;
- 7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
- 8) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polisi Perairan;
- 9) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

10) Peraturan

- 10) Peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;
 - 11) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.
- b. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara saat ini memiliki 206 orang personel dari DSP 290 orang personel dan terbagi atas beberapa bag dan subdit dengan struktur organisasi sebagai berikut:
- 1) Direktur Polairud : KOMBESPOL RASPANI, S.I.K.
 - 2) Wadir Polairud: AKBP AHMAD FADLIN, S.I.K., M.Si.
 - 3) Kabag Binopsnal : -
 Anggota Bagbinopsnal
 - Perwira : 1 pers
 - Brigadir : 15 pers
 - Tamtama : 4 pers
 - PNS : 1 pers
 - 4) Kasubdit Gakkum : AKBP HARRIS BATARA SIMBOLON, S.I.K., S.H., M.Tr.Opsla.
 Anggota Subdit Gakkum
 - Perwira : 4 pers
 - Brigadir : 22 pers
 - Tamtama : -
 - PNS : 1 pers
 - 5) Kasubdit Patroliairud : AKBP YOHANES ANDIS ARYA PANCA PUTRA, S.H., M.H.
 Anggota Subdit Subdit Patroliairud
 - Perwira : 4 pers
 - Brigadir : 79 pers
 - Tamtama : 18 pers
 - PNS : -

6) Kasubdit

6) Kasubdit Fasharkan : AKBP SUWANDI, S.Ag.

Anggota Subdit Subdit Fasharkan

- Perwira : 1 pers
- Brigadir : 8 pers
- Tamtama : 1 pers
- PNS : 1 pers

b. Sarana dan Prasarana yang mendukung tugas Ditpolairud Polda Kalbar adalah:

1) Kendaraan Bermotor umum

- (a) Sepeda Motor : B : 3 Unit
- (b) Mobil Patroli SUV : B : 1 Unit
- (c) Sedan : B : 1 Unit
- (d) Truck Sedang : B : 2 Unit
- (e) Bus Sedang : B : 2 Unit

2) Kendaraan Air

- (a) Kapal Patroli Polisi : RR 1 Unit, B 7 Unit,
- (b) Kapal Patroli Pantai : RR 3 Unit, B 4 Unit,
- (c) Speed Boat/Motor Tempel : RR 10 Unit, B 7 Unit,
- (d) Out Boat Motor : RR 1 Unit
- (e) Perahu Karet : B 7 Unit
- (f) Perahu Motor Tempel : B 1 Unit
- (g) Hover Craft : B 3 Unit
- (h) Kapal Pemburu Cepat : B 1 Unit
- (i) Long Boat : B 2 Unit

3) Alkom

- (a) (b) Handy Talky (HT) : 90 Unit
- (c) Faximile : 1 Unit
- (d) Unit Tranceiver Ssb Portable : 12 Unit
- (e) Unit Tranceiver Ssb Stationery : 2 Unit
- (f) Unit Tranceiver HF Stationery : 2 Unit
- (g) Unit Tranceiver VHF Stationary : 2 Unit
- (h) Unit Tranceiver UHF Stationary : 4 Unit
- (i) Peralatan Antena VHF/FM Lainnya : 1 Unit

(i) Antena

- (j) Antena UHF Stationary : 1 Unit
- (k) Alat RX Radio UHF : 1 Unit
- (l) Charger : 15 Unit
- 4) Senjata Senpi
 - (a) Genggam : 127 Pucuk
 - (b) Senpi Bahu : 268 Pucuk
 - (c) SMR : 5 Pucuk
- 5) Alsus Kepolisian
 - (a) Borgol : RR : 30 Buah
 - (b) Tongkat Push Button : B : 1 Buah
 - (c) Rompi Anti Peluru : RR : 143 Buah
 - (d) Tabung Pemadam Api : RR : 200 Buah
 - (e) Senter Bawah Air : B : 8 Buah
 - (f) Alat Pemotong Stinger : RR : 7 Buah
 - (g) Genset : B : 2 Buah
- c. Tersedianya 1 Kapal Patroli dari Korpolairud Baharkam Polri
- d. Kepercayaan masyarakat terhadap Ditpolairud Polda Kalbar yang terus meningkat yang merupakan cerminan dari kesadaran masyarakat untuk peduli Kamtibmas dan turut serta berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri khususnya Ditpolairud Polda Kalbar dilapangan;
- e. Reputasi / kepercayaan Ditpolairud Polda Kalbar oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka penanganan kasus yang menjadi atensi pemerintah dalam hal penanganan *Trafficking in person, Illegal Logging, Illegal Mining, Illegal Trading, Illegal Fishing*, korupsi, narkoba, kasus penyeludupan kendaraan bermotor, pelanggaran lintas batas orang dan barang;
- f. Adanya koordinasi dan kerjasama Ditpolairud Polda Kalbar dengan instansi samping dan masyarakat dalam menghadapi tantangan tugas Ditpolairud di wilayah perairan Kalimantan Barat;

2) Kelemahan (*weakness*)

- a. Jumlah personel Ditpolairud Polda Kalbar masih belum sesuai dengan DSP 290 Personel saat ini jumlah personel rill 206 personel;
- b. Personel Kapal dan Speed belum masuk dalam Struktur Organisasi karena belum ada Skep pengukuhan dari Kapolri;
- c. Belum memiliki Kapal Patroli Standar Khususnya Type B3 guna menunjang Patroli di Wilayah Perbatasan Negara;
- d. Belum memiliki Ranmor Ambulance dan Ran Air khusus SAR;
- e. Belum adanya Gudang Penyimpan Barang Bukti hasil tangkapan Ditpolairud Polda Kalbar sehingga mengalami permasalahan dalam penyimpanan barang bukti terhadap Kasus yang ditangani;
- f. Belum adanya dukungan anggaran Reklamasi sebelah kanan Mako Ditpolairud, Saluran Air di lingkungan asrama dan gedung Bin Opsnal dan Provost mengingat posisi gedung yang berada di tepi sungai yang mengalami abrasi mengingat factor usia bangunan yang sudah tua;
- g. Belum adanya Garasi Ran Air RIB, Mengingat adanya tambahan Sarana dan Prasarana yang di diterima oleh Satker Ditpolairud Polda Kalbar;
- h. Belum adanya Dok Kapal khususnya untuk mempermudah dalam pemeliharaan dan perawatan angkutan air yang di miliki oleh Ditpolairud Polda Kalbar;

3) Peluang (*opportunities*)

- a. Arah bijak Pemerintah Daerah untuk wilayah perbatasan dan wilayah pedalaman sedang berjalan;
- b. Kebijakan revolusi mental untuk mewujudkan *good government*, *clean governance*, anti korupsi dan pelayanan publik yang prima;
- c. Peningkatan anggaran operasional Kepolisian dan tunjangan kinerja;
- d. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah Kalbar kepada Polda Kalbar dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat Kalbar;

e. Adanya

- e. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap Ditpolairud Polda Kalbar dalam bentuk partisipasi aktif berupa saran dan masukan serta informasi gangguan Kamtibmas Wilayah Perairan melalui layanan pesan singkat;
- f. Makin aktifnya kontrol eksternal dari DPR RI, DPRD, BPK, Komnas HAM dan LSM yang merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap Kinerja Polri dan sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Polri dilapangan;
- g. Adanya atensi pemerintah pusat tentang prioritas perencanaan pembangunan diwilayah perbatasan;
- h. pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Polri di Ditpolairud Polda Kalbar yang secara terus menerus berlanjut merupakan upaya percepatan pencegahan korupsi melalui program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK), hal ini memberikan peluang bagi Ditpolairud Polda Kalbar untuk dapat melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri yang mencakup aspek Struktural, Instrumental dan khususnya aspek Kultural.

4) Ancaman (*Threat*)

- a) Kejahatan lintas batas antar negara dan antar pulau yang terjadi diwilayah hukum Ditpolairud Polda Kalbar terutama rawan terhadap kejahatan lintas negara (*Transnational Crime*) meliputi :
 - (1) pelanggaran lintas batas orang dan barang.
 - (2) *trafficking in person*.
 - (3) penyelundupan hasil hutan dan hasil perkebunan.
 - (4) penyelundupan kendaraan.
 - (5) *illegal logging, illegal mining, illegal trading dan illegal fishing*;
 - (6) pengaruh budaya / adat istiadat.
- b) Wilayah Kalimantan Barat yang memiliki pantai sepanjang 1.163 Km yang merupakan corong barat pertahanan Indonesia bagian Barat serta laut yang demikian luas juga menimbulkan kerawanan

tersendiri

tersendiri, karena dapat mengakibatkan terjadinya pencurian ikan dan hasil laut lainnya, penyelundupan, imigran gelap dan rawan akses peredaran gelap Narkoba;

- c) Sulitnya masyarakat perbatasan (Kalbar - Malaysia) untuk mengakses informasi baik media cetak maupun elektronik dari dalam negeri dan mudahnya masyarakat perbatasan mengakses informasi dari luar (Malaysia) akan berdampak negatif terhadap wawasan kebangsaan dan lunturnya nilai-nilai nasionalisme kebangsaan, sehingga berpotensi menimbulkan ancaman disintegrasi bangsa;
- d) Masih banyaknya pulau - pulau kecil yang berpenghuni dan yang tidak berpenghuni sehingga rawan terjadinya tindak kejahatan dan sengketa pulau dengan negara tetangga;

2. Identifikasi Masalah

Berkembangnya lingkungan strategis yang berdampak pada meningkatnya potensi ancaman dan gangguan keamanan dalam bentuk kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan merugikan kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi serta makin tingginya tuntutan masyarakat terhadap profesionalisme Polri, maka tugas Polda Kalbar pada tahun 2025 diprediksi akan semakin berat, dengan identifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Kekuatan Rill personel Ditpolairud Polda Kalbar saat ini hanya 206 belum sesuai dengan DSP yaitu 290 Personel;
- b. Wilayah Kalbar mempunyai panjang pantai 1.163 KM dan memiliki 218 pulau kecil terdiri dari 161 pulau berpenghuni dan 57 pulau kecil tidak berpenghuni, namun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Ditpolairud Polda Kalbar belum dapat menjangkau lokasi tersebut dalam jangka waktu singkat dikarenakan Kapal Patroli Ditpolairud Polda Kalbar Masih Non Standar;
- c. panjangnya jalur perbatasan dan adanya pulau-pulau terluar yang belum berpenghuni, sangat berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas penyelundupan dan rawan terjadi aneksasi pulau/wilayah Kalbar oleh

pihak

pihak asing masih perlu mendapatkan pengamanan khusus dari Ditpolairud Polda Kalbar;

- d. pengungkapan kejahatan konvensional, Narkoba, terorisme, korupsi, transnational crime dan tindak pidana lainnya perlu ditingkatkan oleh Ditpolairud Polda Kalbar mengingat banyaknya kasus-kasus yang menjadi perhatian publik perlu untuk ditangani secara profesional, khususnya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menjadi antensi pemerintah;
- e. Keterbatasan daya dukungan anggaran yang diberikan kepada Ditpolairud Polda Kalbar guna mendukung pelaksanaan kegiatan operasional terutama pelaksanaan tugas patroli wilayah perbatasan minimnya dukungan anggaran Bmp dan dukungan anggaran patroli yang masih jauh di bawah Norma Indeks;
- f. Belum maksimalnya pelayanan Ditpolairud kepada masyarakat karena keterbatasan personel, anggaran dan Sarpras;
- g. Belum adanya Gudang Penyimpan Barang Bukti;
- h. Belum adanya dukungan anggaran Reklamasi, Saluran Air dan Bangunan Mako mengingat posisi mako yang berada di tepi sungai yang mengalami abrasi mengingat factor usia bangunan yang sudah tua;
- i. Belum adanya Mobil Roda 4 double gardan guna mendukung percepatan pergerakan pasukan dalam pelaksanaan kegiatan SAR
- j. Belum adanya Dok Kapal khususnya untuk mempermudah dalam pemeliharaan dan perawatan angkutan air yang di miliki oleh Ditpolairud Polda Kalbar;
- k. Belum Terpenuhi Kapal Patroli Standar Khususnya Type B3 guna menunjang Patroli di Wilayah Perbatasan Negara;

II. Tujuan dan Sasaran

1. Visi dan Misi Polda Kalbar

a. Visi Polda Kalbar

Terwujudnya Kalimantan Barat yang Aman dan Tertib.

b. Misi

b. Misi Polda Kalbar

Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat Kalimantan Barat.

2. **Visi dan Misi Ditpolairud Polda Kalbar**

a. Visi Ditpolairud Polda Kalbar

Visi Ditpolairud Polda Kalbar mengacu pada visi Polda Kalbar yang menetapkan visi organisasi sampai dengan tahun 2025, yaitu:

" Mewujudkan Ditpolairud Polda Kalbar yang unggul dalam Pemeliharaan Kamtibmas di Wilayah Perairan serta terdukungnya setiap kegiatan dan Operasi Kepolisian dalam rangka memantapkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia".

Visi tersebut mengandung beberapa makna, yakni:

1. Ditpolairud Polda Kalbar sebagai sentra Pelayanan Kamtibmas Yang Prima di wilayah perairan Kalimantan Barat.
2. Ditpolairud Polda Kalbar sebagai Garda terdepan dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin kepastian hukum dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;

b. Misi Ditpolairud Polda Kalbar

Misi Ditpolairud Polda Kalbar sampai dengan tahun 2025, yaitu:

"Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif serta memberi rasa aman kepada masyarakat pesisir".

Makna : Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif dan rasa aman kepada seluruh masyarakat pesisir Kalimantan Barat, menjaga Kamtibcar pelayaran untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang, serta menegakkan hukum secara profesional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan di perairan Polda Kalbar.

3. Tujuan

3. Tujuan Jangka Menengah

a. Polda Kalbar

Adapun tema pembangunan Polda Kalbar adalah “Polda Kalbar yang Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

- 1) menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Barat
- 2) menegakkan hukum secara berkeadilan;
- 3) modernisasi pelayanan Polri;
- 4) mewujudkan Polri yang profesional;
- 5) menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya.

b. Ditpolairud Polda Kalbar

Ditpolairud Polda Kalbar turut serta mendukung Polda Kalbar dalam “Menjaga Stabilitas Kamtibmas dalam rangka mendukung Peningkatan Produktifitas untuk Transformasi Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan dari 5 poin tujuan jangka menengah Polda Kalbar tersebut diatas Ditpolairud Polda Kalbar melaksanakan poin:

- 1) menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kalimantan Barat dengan penjabaran Ditpolairud melaksanakan kegiatan Patroli di wilayah perairan Kalimantan barat guna menciptakan situasi kamtibmas serta terdukungnya setiap kegiatan dan Operasi Kepolisian di wilayah perairan.
- 2) menegakkan hukum secara berkeadilan di wilayah perairan Kalimantan Barat dengan penjabaran Ditpolairud Polda Kalbar melaksanakan penegakan hukum dengan menjaga ketertiban, keamanan, dan kedaulatan wilayah perairan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat perairan, nelayan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

4. Sasaran

4. Sasaran Prioritas

a. Polda Kalbar

Sasaran Prioritas Polda Kalbar tahun 2025 mengacu kepada Sasaran Prioritas Kapolri yaitu sebagai berikut:

- 1) **pertama** “Mewujudkan Sinergitas Polisi, Masyarakat dan Stakeholder dalam rangka Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Secara Proaktif”;
- 2) **kedua** “Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Polri yang Semakin Inovatif”;
- 3) **ketiga** “Mewujudkan Penegakkan Hukum dan Pelayanan Penanganan Perkara yang Adil, Transparan, Legal, Humanis dan Setara”;
- 4) **keempat** “Mewujudkan Pengelolaan SDM yang Mandiri, Berintegritas dan Profesional”;
- 5) **kelima** “Mewujudkan Almatsus, Perbekalan dan Fasilitas Konstruksi Polri yang Modern dan Memadai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Berbasis Minimum Essential Police Equipment (MEPE)”
- 6) **keenam** “Mewujudkan Budaya Integritas, Kejujuran dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian”

b. Ditpolairud Polda Kalbar

Sasaran Prioritas Polda Kalbar tahun 2025 mengacu kepada Sasaran Prioritas Polda Kalbar yaitu sebagai berikut:

- 1) **pertama** “Mewujudkan Sinergitas Polisi, Masyarakat dan Stakeholder dalam rangka Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Secara Proaktif”;
2. **ketiga** “Mewujudkan Penegakkan Hukum dan Pelayanan Penanganan Perkara yang Adil, Transparan, Legal, Humanis dan Setara”;

III. Program Prioritas Nasional dan Arah Kebijakan Polri Tahun 2025

1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Kalbar Tahun 2025

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polda Kalbar Tahun 2025, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi Polda Kalbar sebagai berikut:

- a. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Mewujudkan Sinergitas Polisi, Masyarakat dan Stakeholder dalam rangka Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Secara Proaktif”** yaitu:

- 1) Meningkatkan kemampuan deteksi aksi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) analisis keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 3112);
 - b) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik (prog.Harkamtibmas Giat 3114);
 - c) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi (prog.Harkamtibmas/Giat 3115);
 - d) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya (prog.Harkamtibmas/Giat 3116);
 - e) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara (prog.Harkamtibmas/Giat 3117);
 - f) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan khusus (prog.Harkamtibmas/Giat 3150.
- 2) menurunkan potensi kejahatan, gangguan Kamtibmas melalui kegiatan peningkatan edukasi dan kolaborasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) pembinaan potensi keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 5076);

b) pembinaan

- b) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130);
 - c) penyelenggaraan pengamanan objek vital (prog.Harkamtibmas/Giat 3131);
 - d) penyelenggaraan kepolisian perairan (prog.Harkamtibmas/Giat 3134);
 - e) pengelolaan Multimedia (Prog.dukma/Giat 3149).
- 3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan “Pemolisian Prediktif” dalam rangka menjaga Stabilitas Harkamtibmas” (Cooling System);
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pembinaan potensi keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 5076);
 - b) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130);
 - c) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas (prog.Harkamtibmas/Giat 3133).
- 4) Mengedepankan penanganan konflik secara humanis;
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) analis keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 3112);
 - b) pembinaan potensi keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 5076);
 - c) penanggulangan keamanan dalam negeri (prog.Harkamtibmas/Giat 5087);
 - d) pelayanan psikologi Anggota Polri (prog.Harkamtibmas/Giat 3110);
 - e) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130).

5) mewujudkan

- 5) mewujudkan Kamseltibcar Lantas guna memberikan rasa aman berkendara saat terjadi kemacetan dan jam rawan kejahatan;
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130);
 - b) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas (prog.Harkamtibmas/Giat 3133).
- 6) meningkatkan peran aktif Polda Kalbar di lokasi rawan gempa, bencana dan *slum area*
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130);
 - b) pembinaan potensi keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 5076);
 - c) penanggulangan keamanan dalam negeri (prog.Harkamtibmas/Giat 5087).
- 7) melaksanakan kegiatan pengamanan *event* nasional/ internasional selama tahun 2025;
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) pembinaan operasi kepolisian (prog.Harkamtibmas/Giat 5079);
 - b) penanggulangan keamanan dalam negeri (prog.Harkamtibmas/Giat 5087);
 - c) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas (prog.Harkamtibmas/Giat3133);
 - d) penyelenggaraan

- d) penyelenggaraan pengamanan objek vital (prog.Harkamtibmas/Giat 3131);
 - e) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130);
 - f) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya (prog.Harkamtibmas/Giat 3116);
- 8) meningkatkan penggelaran operasional kepolisian dan *back up* kewilayahan dalam rangka penanganan konflik sosial (agrarian) pengamanan unjuk rasa; dan gangguan keamanan bersenjata serta menjalin sinergisitas polisional; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130);
 - b) penanggulangan keamanan dalam negeri (prog.Harkamtibmas/Giat 5087);
 - c) pembinaan potensi keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 5076);
 - d) pembinaan operasi kepolisian (prog.Harkamtibmas/Giat 5079);
 - e) kerja sama keamanan dan ketertiban K/L (prog.Harkamtibmas/Giat 3120);
- 9) Meningkatkan kerja sama kepolisian dalam/luar negeri guna mendukung Stabilitas Harkamtibmas; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- kerja sama keamanan dan ketertiban K/L (prog.Harkamtibmas/Giat 3120);
- 10) meningkatkan kegiatan *surveillance* patroli kapal dan pesawat udara Polri di wilayah perbatasan guna mendukung terlaksananya pengamanan laut/pesisir;

untuk

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) penyelenggaraan kepolisian perairan (prog. Harkamtibmas/Giat 3134);

- 11) meningkatkan kehadiran Polri di wilayah perbatasan dan pulau berpenghuni;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog. Harkamtibmas/Giat 3130);
- b) penyelenggaraan kepolisian perairan (prog. Harkamtibmas/Giat 3134).

- b. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Polri yang Semakin Inovatif”**, yaitu:

- 1) melaksanakan kegiatan “JUMAT CURHAT dan MINGGU KASIH sebagai sarana untuk menerima kritik, masukan maupun aduan publik.

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut maka strategi yang akan dilakukan:

pambinaan potensi keamanan (Prog. Harkamtibmas/Giat 5076);

- 2) melaksanakan modernisasi fasilitas sarana dan prasarana pada sentra pelayanan publik yang berbasis TIK serta terintegrasi;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) pengembangan peralatan Polri (Prog.modernisasialmatsus dan saropras Polri/Giat 3084);
- b) teknologi komunikasi (Prog.dukma/Giat 5055);
- c) penyelenggaraan teknologi informasi (Prog.dukma/Giat 3071).

3) meningkatkan

- 3) meningkatkan dan menjaga profesionalisme anggota Polri dalam melayani masyarakat guna meniadakan segala pungutan liar pada pelayanan publik;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) penyelenggaraan pendidikan dan latihan Polri (Prog.SDM/Giat 3100);
 - b) pembinaan potensi keamanan (Prog.Harkamtibmas/Giat 5076);
 - c) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas (Prog. Harkamtibmas/Giat 3133);
 - d) dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Prog. Harkamtibmas/Giat 3128).
- 4) meningkatkan mengoptimalkan ruang SPKT dan RPK yang *online* dan humanis serta berbasis TIK;
‘ untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) penindakan tindak pidana umum (Prog.lidiksidik/Giat 3142);
 - b) penyelenggaraan pendidikan dan latihan Polri (Prog.SDM/Giat 3100);
- 5) meningkatkan *quick response* kepolisian sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (Prog.Harkamtibmas/Giat 3130);
 - b) pelayanan Kesehatan Polri (Prog.dukma/Giat 3072).
- c. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas
“Mewujudkan Penegakkan Hukum dan Pelayanan Penanganan

Perkara yang Adil, Transparan, Legal, Humanis dan Setara”,
yaitu:

- 1) meningkatkan profesionalisme penyidik dalam penanganan meningkatkan penanganan dan penyelesaian tindak pidana oleh penyidik guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) penyelenggaraan identifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (Prog.lidiksidik/Giat 3140);
 - b) penyelenggaraan laboratorium forensik (Prog.lidiksidik/Giat 3141)
 - c) penindakan tindak pidana umum (Prog.lidiksidik/Giat 3142);
 - d) penindakan tindak pidana Narkoba (Prog.lidiksidik/Giat 3144);
 - e) penindakan tindak pidana ekonomi khusus (Prog.lidiksidik/Giat 3145);
 - f) penindakan tindak pidana korupsi (Prog.lidiksidik/Giat 3146);
 - g) penindakan tindak pidana Siber (Prog.lidiksidik/Giat 3151);
 - h) penindakan tindak pidana tertentu (Prog.lidiksidik/Giat 5083);
 - i) penyelenggaraan kepolisian perairan (Prog.lidiksidik/Giat 3134);
 - j) penindakan tindak pidana lalu lintas (Prog.lidiksidik/Giat 4343).
 - k) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130).
- 2) meningkatkan proses pengawasan penyidikan guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

untuk

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

pengawasan penyidikan (Prog.lidiksidik/Giat 5086)

- d. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Mewujudkan Pengelolaan SDM yang Mandiri, Berintegritas dan Profesional”**, yaitu:

- 1) menggunakan Bisnis Proses Polri dan Manajemen Resiko dalam pengembangan struktur organisasi Polri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri (Prog.dukma/Giat 5052)
- 2) meningkatkan kapabilitas SDM Polri yang unggul di era *Police 4.0*;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
pengendalian pegawai Polri (Prog.SDM/Giat 3107)
- 3) melanjutkan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
pengendalian pegawai Polri (Prog.SDM/Giat 3107).
- 4) meningkatkan pengelolaan SDM yang profesional dan humanis;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) manajemen anggaran (Prog.dukma/Giat 5054);
 - b) pembinaan karier personel Polri (Prog.dukma/Giat 3108);
 - c) penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri (Prog.SDM/Giat 3105).
- 5) melaksanakan Sistem Manajemen Karir berbasis kinerja.
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

pembinaan

- pembinaan karier personel Polri (Prog.SDM/Giat 3108);
- 6) meningkatkan keterampilan dan etika Yanlik serta kemampuan komunikasi digital;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri (Prog.SDM/Giat 3100)
 - 7) meningkatkan kesejahteraan melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja bagi aparaturnya Polri.
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) pelayanan kesehatan (Prog.dukma/Giat 3072);
 - b) pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri (Prog.modernisasialmatsus dan sarpras Polri/Giat 5062);
 - c) penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri (Prog.SDM/Giat 3105).
- e. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Mewujudkan Almatsus, Perbekalan dan Fasilitas Konstruksi Polri yang Modern dan Memadai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Berbasis *Minimum Essential Police Equipment (MEPE)*”**, yaitu:
- 1) memodernisasi serta memenuhi sarana dan prasarana serta Almatsus Polri yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) pengkajian dan strategi sarpras (Prog. Modernisasi almatsus dan sarpras Polri/Giat 5060);
 - b) pengembangan peralatan Polri (Prog. Modernisasi almatsus dan sarpras Polri/Giat 3084);

2) mendukung

- 2) mendukung peran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (Bumnis) dan industri swasta nasional dalam pemenuhan Almitsus Alpalhankam di lingkungan Polri; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
pengkajian dan strategi Sarpras (Prog. Modernisasi almitsus dan sarpras Polri/Giat 5060);
 - 3) melanjutkan pembangunan dan menyatukan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) pengembangan peralatan Polri (Prog. Modernisasi almitsus dan sarpras Polri/Giat 3084);
 - b) teknologi komunikasi (Prog. dukma/Giat 5055).
 - 4) mengoptimalkan kampanye penggunaan hotline 110 dalam menerima dan merespon pengaduan/ pelaporan masyarakat; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
teknologi komunikasi (Prog. dukma/Giat 5055).
- f. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Mewujudkan Budaya Integritas, Kejujuran dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian”**, yaitu:
- 1) menguatkan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis *Medsos/ WhatsApp*; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan (Prog. dukma/Giat 3091);
 - b) pengawasan penyidikan (Prog. lidiksidik/Giat 5086);
 - c) pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (Prog. dukma/Giat 5056);
 - 2) mengoptimalkan Saber Pungli (sapu bersih pungutan liar) di lingkungan internal Polri;
- untuk

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan (Prog.dukma/Giat 3091).

- 3) meningkatkan kegiatan pencegahan perilaku yang menyimpang (perilaku arogan dan tidak profesional) serta perbuatan korupsi di internal Polri;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) penyelenggaraan pengamanan internat Polri (Prog.dukma/Giat 3089);

- b) pelayanan administrasi keuangan Polri (Prog.lidiksidik/Giat 3068);

- 4) meningkatkan tata kelola manajemen kinerja perencanaan dan penganggaran Polri yang akuntabel berbasis manajemen risiko;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) penyusunan kebijakan Polri (Prog.dukma/Giat 5051);

- b) manajemen anggaran (Prog.dukma/Giat 5054);

- c) pelayanan administrasi keuangan Polri (Prog.dukma/Giat 3068);

- d) *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan anggaran Polri (Prog.dukma/Giat 4339).

- 5) melanjutkan penataan kelembagaan dan tata laksana Mabes Polri, Polda, Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar efektif dan efisien sesuai dengan *Proses Bisnis* Polri;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri (Prog.dukma/Giat 5052).

6) meningkatkan

- 6) meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
Reformasi Birokrasi Polri (Prog.dukma/Giat 5053).

2. Arah Kebijakan dan Strategi Ditpolairud Polda Kalbar Tahun 2025

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Ditpolairud Polda Kalbar Tahun 2025, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi Ditpolairud Polda Kalbar sebagai berikut:

- a. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Mewujudkan Sinergitas Polisi, Masyarakat dan Stakeholder dalam rangka Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Secara Proaktif”**, yaitu:

- 1) meningkatkan kegiatan *surveillance* patroli kapal dan pesawat udara Polri di wilayah perbatasan guna mendukung terlaksananya pengamanan laut/pesisir untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

penyelenggaraan kepolisian perairan (prog. Harkamtibmas/Giat 3134);

- a) patroli perairan yang dilaksanakan oleh Ditpolairud Polda Kalbar dengan sasaran Pulau-Pulau berpenghuni maupun tidak berpenghuni dan perbatasan antar negara malaysia di wilayah Kalimantan Barat ;
- b) memberikan bantuan Search and Rescue (SAR) pada korban bencana alam maupun laka air.

Dengan kebijakan:

- (1) menyelenggarakan pengaturan, pengawalan dan patroli;
- (2) pemberian bantuan SAR;

(3) patroli

(3) patroli bersama unsur maritim Kalimantan Barat;

(4) pengamanan wilayah perbatasan patroli bersama Polis Marine (Roundezvous).

2) meningkatkan kehadiran Polri di wilayah perbatasan dan pulau berpenghuni;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

penyelenggaraan kepolisian perairan (prog. Harkamtibmas/Giat 3134) melaksanakan kegiatan pertemuan Kemitraan Polisi dan Masyarakat dengan sasaran kegiatan masyarakat perairan di wilayah Kalimantan Barat.

Dengan kebijakan:

Melaksanakan kegiatan tatap muka dan penyuluhan masyarakat perairan.

b. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Mewujudkan Penegakkan Hukum dan Pelayanan Penanganan Perkara yang Adil, Transparan, Legal, Humanis dan Setara”**, yaitu:

1) meningkatkan penanganan dan penyelesaian tindak pidana oleh penyidik guna memenuhi rasa keadilan masyarakat untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) penyelenggaraan laboratorium forensik (Prog. lidiksidik/Giat 3141);

penyelenggaraan laboratorium forensik dengan sasaran kegiatan penyidikan dan penyelidikan kasus yang memerlukan pengujian laboratorium.

Dengan kebijakan:

Memberikan dukungan administrasi laboratorium forensik.

b) penyelenggaraan kepolisian perairan (Prog.lidiksidik/Giat 3134);

kegiatan

kegiatan penanganan tindak pidana perairan guna memberikan rasa aman nyaman dan adil kepada masyarakat yang melaksanakan kegiatan di perairan.

Dengan kebijakan:

Melaksanakan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana umum pada kasus sangat sulit, sulit dan sedang yang terjadi di perairan.

- c. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Mewujudkan Almatsus, Perbekalan dan Fasilitas Konstruksi Polri yang Modern dan Memadai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Berbasis *Minimum Essential Police Equipment (MEPE)*”**, yaitu:

- 1) memodernisasi serta memenuhi sarana dan prasarana serta Almatsus Polri yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) dukungan dan manajemen teknik sarpras (Prog. Modernisasi almatsus dan sarpras Polri/Giat 5059); melaksanakan pemeliharaan dan perawatan terhadap sarana dan prasarana, alsus, almatsus serta gedung bangunan Ditpolairud Polda Kalbar;

Dengan kebijakan:

Memberikan dukungan anggaran pemeliharaan dan perawatan terhadap sarana dan prasarana, alsus, almatsus serta gedung bangunan Ditpolairud Polda Kalbar guna memperpanjang usia pakai.

- b) pengembangan perbekalan umum (Prog. Modernisasi almatsus dan sarpras Polri/Giat 5061); kegiatan pengadaan BMP Ditpolairud:

Dengan kebijakan:

Untuk

Untuk mendukung kegiatan patroli perairan, kendaraan dinas dan kegiatan operasional Ditpolairud yang memerlukan dukungan BMP.

IV. Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Ditpolairud Polda Kalbar T.A. 2025

1. Program dan Kegiatan

- a. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Ditpolairud Polda Kalbar
 - 1) Tujuan:
Terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan modernisasi Almatsus dan sarana prasarana Ditpolairud Polda Kalbar guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi bidang pembinaan dan operasional di wilayah perairan Kalimantan Barat.
 - 2) Kegiatan:
 - a) dukungan manajemen dan teknis Sarpras;
 - b) pengembangan perbekalan umum.
- b. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
 - 1) Tujuan:
Terpeliharanya Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional dan informasi kepolisian serta kerjasama lintas sektoral yang fokus pada pelaksanaan tugas fungsi deteksi aksi, preemtif dan preventif di wilayah perairan Kalimantan Barat.
 - 2) Kegiatan:
 - a) dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) penyelenggaraan kepolisian perairan;
- c. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
 - 1) Tujuan:
Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Kalimantan Barat melalui penegakan hukum yang profesional

profesional, proporsional, dan akuntabel serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- 2) Kegiatan:
 - a) penyelenggaraan laboratorium forensik;
 - b) penindakan tindak pidana perairan;

2. Pagu Indikatif Ditpolairud Polda Kalbar Tahun Anggaran 2025

- a. Alokasi Pagu Indikatif Ditpolairud Polda Kalbar T.A. 2025 sebesar Rp. 29.071.504.000.- (*Dua Puluh Sembilan Milyar Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Ribu Rupiah*). Adapun rincian pagu Indikatif Ditpolairud Polda Kalbar T.A. 2025 sebagai berikut:

- 1) Rincian Pagu Indikatif Ditpolairud Polda Kalbar T.A. 2025 per Jenis Belanja sebagai berikut:
 - a) Belanja Pegawai : Rp. 14.191.823.000,-
 - b) Belanja Barang : Rp. 14.879.681.000,-
 - c) Belanja Modal : Rp. 0,-
- 2) Rincian Pagu Indikatif Ditpolairud Polda Kalbar T.A. 2025 per sumber anggaran sebagai berikut:
 - a) Rupiah Murni : Rp. 29.071.504.000,-
 - b) PNBK : Rp. 0,-
 - c) BLU : Rp. 0,-
- 3) Rincian Pagu Indikatif Ditpolairud Polda Kalbar T.A. 2025 per Program sebagai berikut:
 - a) Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
Rp. 2.049.847.000,-;
 - b) Modernisasi Alarmsus dan Sarana Prasarana Polri
Rp. 10.697.335.000,-;
 - c) Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Rp. 16.324.322.000,-.

- b. Kegiatan yang berdasarkan Pagu Indikatif Ditpolairud Polda Kalbar T.A. 2025

1. Mengakomodir kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan termasuk tunjangan kinerja, pemenuhan Intake Ditpolairud Polda Kalbar tahun 2025, namun Pagu Indikatif ini belum termasuk untuk penambahan tunjangan kinerja sampai dengan 80%;
2. Mendukung kegiatan operasional anggaran perkantoran (antara lain: biaya pemeliharaan, BMP, daya dan jasa serta keperluan sehari-hari perkantoran);
3. Mendukung kegiatan fungsi teknis kepolisian, berupa: deteksi potensi gangguan keamanan, pencegahan dan penanggulangan keamanan, pembinaan pelayanan dan perlindungan masyarakat, penegakkan hukum, pengamanan kegiatan masyarakat, serta untuk mendukung tercapainya prioritas Ditpolairud Polda Kalbar tahun 2025;
4. Meningkatkan kegiatan keamanan laut pada poros maritim dengan memperkuat satuan Polair jajaran Polda Kalbar;
5. Meningkatkan pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli pada tempat-tempat dan jam rawan gangguan Kamtibmas serta di wilayah perbatasan Kalimantan Barat;
6. Melaksanakan penyusunan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Ditpolairud Polda Kalbar serta pemberian advokasi terhadap institusi Polri, anggota Polri maupun keluarga Polri di Ditpolairud Polda Kalbar;
7. Mengakomodir dan mendukung kegiatan Program Prioritas Kapolda Kalbar yang terdiri dari:
 - a) menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0;
 - b) perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0;
 - c) pemantapan kinerja pemeliharaan Kamtibmas;
 - d) peningkatan kinerja penegakan hukum;
 - e) penguatan penanganan konflik sosial;
 - f) peningkatan kualitas pelayanan publik Polri;
 - g) mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegritas;
 - h) pemantapan

- h) pemantapan komunikasi publik;
- i) pengawasan pimpinan terhadap setiap kegiatan;
- j) penguatan fungsi pengawasan;
- k) pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan (public complain).

V. Penutup

Demikian Rencana Kerja Ditpolairud Polda Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di: Pontianak
pada tanggal: 26 September 2024



RASPANI, S.I.K.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74030643

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA**



**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
DITPOLAIRUD POLDA KALBAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) DITPOLAIRUD POLDA KALBAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	KET
			2025	
1	2	3	4	5
1.	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Patroli Perairan Kalbar	0,01	
2.	Penegakan Hukum Secara Berkeadilan	Persentase penyelesaian Tindak Pidana Umum di perairan	97 %	

Ditetapkan di: Pontianak

pada tanggal: 26 September 2024



DIREKTUR DITPOLAIRUD POLDA KALBAR

RASPANI, S.I.K.

KOMISARIS BESAR POLSI NRP 74030643

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA**



**LAMPIRAN SPRIN POKJA SUN RENJA
DITPOLAIRUD POLDA KALBAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA

NOTA DINAS

Nomor : B / ND - 135 / IX / 2024 / Subbagrenmin

Kepada : Yth. 1. Kabag Binopsnal
2. Kasubdit Gakkum
3. Kasubdit Patroliairud
4. Kasubdit Fasharkan

Dari : PS. Kasubbagrenmin

Hal : rapat penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Ditpolairud Polda Kalbar T.A. 2025.

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/1/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Pedoman Pperencanaan Kapolri Tahun 2025;
 - c. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Sprin/982/VII/REN.2.3./2024 tanggal 2 Juli 2024 hal kelompok kerja penyusunan rencana kerja Polda Kalbar T.A. 2025;
 - d. Surat Perintah Direktur Polairud Polda Kalbar Nomor: Sprin/Sprin/522/IX/REN.2.3./2024 tanggal 23 September 2024 hal tim Pokja penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Ditpolairud Polda Kalbar T.A. 2025;
 - e. Rencana Kerja Ditpolairud Polda Kalbar T.A. 2024.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan dengan hormat kepada alamat bahwa akan dilaksanakan rapat penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Ditpolairud Polda Kalbar T.A. 2025 dimohon untuk hadir mengikuti giat rapat yang dimaksud pada:
 - a. Hari : Senin;
 - b. Tanggal : 30 September 2024;
 - c. Pakaian : yang berlaku pada hari itu;
 - d. Tempat : PPKO Ditpolairud Polda Kalbar.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Pontianak, 23 September 2024
PS. KASUBBAG RENMIN


JUMARI SETIAWAN, S.H., M.A.P
AKP NRP 79010114

Tembusan :

1. Kaur Keuangan.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA



SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin/ 522 /IX/REN.2.3./2024

- Pertimbangan : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Direktorat kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalimantan Barat dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
3. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/1/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang pedoman perencanaan Kapolri Tahun 2025;
4. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Sprin/982/VII/REN.2.3./2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Kelompok Kerja penyusunan Renja Polda Kalbar T.A. 2025.

DIPERINTAHKAN

- Kepada : NAMA, PANGKAT, JABATAN DAN KESATUAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.
- Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari agar melaksanakan tugas sebagai tim Pokja penyusunan Rencana Kerja (Renja) Ditpolairud Polda Kalbar T.A. 2025;
2. Megadakan koordinasi dan kerja sama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait;
3. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Direktur Polairud Polda Kalbar;
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Pontianak
pada tanggal : 23 September 2024

DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALIMANTAN BARAT

RASPANI, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74030643

Tembusan :

1. Kapolda Kalbar.
2. Irwasda Polda Kalbar.
3. Karorena Polda Kalbar.

**DAFTAR NAMA PERSONEL YANG TERLIBAT DALAM
TIM POKJA PENYUSUNAN RENJA DITPOLAIRUD POLDA KALBAR T.A. 2025**

NO	N A M A	PANGKAT	NRP	JABATAN	
				ORGANIK	POKJA
1	2	3	4	5	6
1.	RASPANI, S.I.K.	KOMBES POL	74030643	DIREKTUR POLAIRUD	PENANGGUNG JAWAB
2.	AHMAD FADLIN, S.I.K., M.Si	AKBP	75121174	WADIR POLAIRUD	WAKIL P. JAWAB
3.	JUMARI SETIAWAN, S.H., M.A.P	AKP	79010114	PS. KASUBBAGRENMIN	KETUA PELAKSANA
4.	ERVINNAH, A.Md.Kep., S.K.M.	PENATA	198007072006042006	PS. KAUREN SUBBAGRENMIN	SEKRETARIS
5.	SUYADI	IPTU	69010379	PAMIN 1 SUBBAG RENMIN	ANGGOTA
6.	RAHMAT GATRA KECANA	BRIGPOL	91070173	BAMIN URREN SUBBAG RENMIN	ANGGOTA
7.	MUHAMMAD RISALDI JULIANSYAH	BRIPTU	96071077	BAMIN URREN SUBBAG RENMIN	ANGGOTA
8.	HERI MARTONO	IPTU	69030199	KAURKEU SUBBAGRENMIN	BENDAHARA
9.	TONI WIBOWO, S.H.	BRIPKA	86041778	PS. PAMIN 6 SUBBAGRENMIN	ANGGOTA
10.	MUHAMMAD KHAFID	BRIGPOL	92110044	BAMIN URKEU SUBBAG RENMIN	ANGGOTA
11.	APEP SYAMSUL HAKIM, S.IP.	KOMPOL	69010379	KASUBBAGMINOPSNAL BAGBINOPSNAL	TIM BAG BINOPSNAL
12.	PURWANTO	BRIPKA	80100960	BAMIN BAGBINOPSNAL	ANGGOTA
13.	MAHRANI, S.H.	BRIPKA	88100644	BAMIN BAGBINOPSNAL	ANGGOTA
14.	HARRIS BATARA SIMBOLON, S.I.K., S.H., M.Tr.Opsla.	AKBP	80041299	KASUBDIT GAKKUM	TIM SUBDIT GAKKUM
15.	FEBY RANDO, S.I.K., M.H.	KOMPOL	87021332	KASISIDIK SUBDIT GAKKUM	ANGGOTA
16.	ABDUL KADIR JAILANI, S.H.	BRIGPOL	92040072	BAMIN SUBDIT GAKKUM	ANGGOTA
16.	SUWANDI, S. Ag	AKBP	73050635	KASUBDIT FASHARKAN	TIM SUBDIT FASHARKAN
17.	IYAN NURDIYAN	BRIPKA	79051526	PS. PAMIN 1 SIFAS SUBDIT FASHARKAN	ANGGOTA
18.	KHABUL JOKO SAPUTRO	BRIPDA	93030077	BAMIN SUBDIT FASHARKAN	ANGGOTA
19.	YOHANES ANDIS ARYA PANCA PUTRA, S.H., M.H.	AKBP	74120887	KASUBDIT PATROLIAIRUD	TIM SUBDIT PATROLIAIRUD
20.	AGUS MULYADI S.Kom	KOMPOL	73030714	KASI PATWALAIRUD	ANGGOTA
22.	AAM KUDUSSALAM, S.H., M.H.	AKP	69100126	PS. KASIBINMASAIR SUBDIT PATROLIAIRUD	ANGGOTA
23.	SUDIRMO, S.H.	AIPDA	85041152	PS. PANIT 2 SISARBINMASAIR SUBDIT PATROLIAIRUD	ANGGOTA
24.	HERY MARTONO	AKP	69030199	KAURKEU SUBBAGRENMIN	TIM SUBBAG RENMIN

LAMP. SPRIN DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALBAR
NOMOR : SPRIN / 522 /IX/REN.2.3./2024
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2024

NO	N A M A	PANGKAT	NRP	JABATAN	
				ORGANIK	POKJA
1	2	3	4	5	6
25.	RINI JULIANTI	PENATA	197207271993032003	PS. KAURMINTU SUBBAG RENMIN	ANGGOTA
26.	ADYTIA DETA GEMILANG	BRIPTU	00050061	BAMIN SUBBAG RENMIN	ANGGOTA
27.	FRANSISKUS DEBI, S.H.	BRIPDA	92020178	BAMIN URMIN SUBBAG RENMIN	ANGGOTA
	FRI ANGGRENI	BRIPKA	89080415	BAMIN URREN SUBBAG RENMIN	NOTULEN

Dikeluarkan di : Pontianak
pada tanggal 23 September 2024

DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALIMANTAN BARAT



RASPANI, S.I.K.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74030643

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA**



**LAMPIRAN RENCANA KERJA KEMENTRIAN / LEMBAGA
DITPOLAIRUD POLDA KALBAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

REKAP 1: K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2025

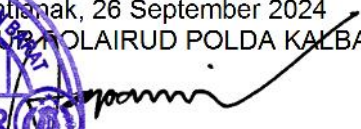
- 1. **KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT (DITPOLAIRUD POLDA KALBAR)
- 2. **VISI** : Mewujudkan Ditpolairud Polda Kalbar yang unggul dalam Pemeliharaan Kamtibmas di Wilayah Perairan serta terdukungnya setiap kegiatan dan Operasi Kepolisian dalam rangka memantapkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia
- 3. **MISI** : Memberikan Perlindungan, Pengayoman Dan Pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif serta memberi rasa aman kepada masyarakat pesisir
- 4. **PRIORITAS NASIONAL**
- 5. **SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L**

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2025	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat		16.324.322,-
01.01	Indeks Harkamtibmas	0,01	
02	Penegakkan hukum secara berkeadilan		2.049.847,-
02.01	Indeks Gakkum	97 %	
03	Modernisasi Teknologi		10.697.335,-
04.01	Persentase Pemenuhan Almatsus	-	

LAMP. KEP. DIRPOLAIRUD POLDA KALBAR
NOMOR : KEP/ 06 / IX / 2024
TANGGAL: 26 SEPTEMBER 2024

6. PROGRAM PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
060.BI	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	2.049.847	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.049.847
060.BP	Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	10.697.335	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.697.335
060.BQ	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	16.324.322	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.324.322
Total		29.071.504	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29.071.504

Pontianak, 26 September 2024
DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALBAR

RASPANI, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74030643



REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT (DITPOLAIRUD POLDA KALBAR)
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 02 - Penegakkan hukum secara berkeadilan
3. PROGRAM : Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
4. PRIORITAS NASIONAL
5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Penegakan Hukum Secara Berkeadilan		2.049.847,0
01.01	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Umum di Perairan	97 %	
Total			2.049.847,0

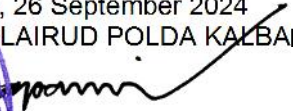
6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	layanan penegakkan hukum oleh Polri	2.049.847,0
01.01	Indeks Penegakkan hukum Polri	
Total		2.049.847,0

LAMP. KEP. DIRPOLAIRUD POLDA KALBAR
NOMOR : KEP/ 06 / IX / 2024
TANGGAL: 26 SEPTEMBER 2024

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
3141	Penyelenggaraan Laboratrium Forensik	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0
4342	Penindakan Tindak Pidana Perairan	2.045.847,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.045.847,0
Total		2.049.847,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.049.847,0

Palangkaraya, 26 September 2024
DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALBAR

KOM. SARIN S. I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74030643



REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT (DITPOLAIRUD POLDA KALBAR)
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 04 – Modernisasi Teknologi
3. PROGRAM : Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri
4. PRIORITAS NASIONAL
5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Modernisasi Teknologi		10.697.335,0
01.01	Persentase Sarpras Ditpolairud	-	
Total			10.697.335,0

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Almatsus dan Saprass	10.697.335,0
01.01	Persentase Sarpras Ditpolairud	
Total		10.697.335,0

LAMP. KEP. DIRPOLAIRUD POLDA KALBAR
NOMOR : KEP/ 06 / IX / 2024
TANGGAL: 26 SEPTEMBER 2024

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
5059	Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras	3.951.277,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.951.277,0
5061	Pengembangan Perbekalan umum	6.746.058,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.746.058,0
Total		10.697.335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.697.335,0

Montanak, September 2024
DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALBAR

RASPANI, S.I.K
KOMISARIS BESAR POISI NRP 74030643



REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT (DITPOLAIRUD POLDA KALBAR)
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 01 – Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
3. PROGRAM : Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
4. PRIORITAS NASIONAL
5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat		16.324.322,0
01.01	Jumlah Patroli Perairan Kalbar	0,01	
Total			16.324.322,0

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Layanan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	16.324.322,0
01.01	Indeks Harkamtibmas	
Total		16.324.322,0

LAMP. KEP. DIRPOLAIRUD POLDA KALBAR
NOMOR : KEP/ 06 / IX / 2024
TANGGAL: 26 SEPTEMBER 2024

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
3128	Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	16.165.722,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.541.575,0
3134	Penyelenggaraan Kepolisian Perairan	158.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158.600,0
Total		16.324.322,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.324.322,0

Di Kalbar, 26 September 2024,
DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALBAR

RASPANI, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POISI NRP 74030643

